

Kerja Sama Indonesia–Korea melalui Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) terhadap Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020–2023

Sitty Maisyaro Kalauw^{1*}, Nurinaya², Etik Siswatiningrum³
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: maisyarokalauw@gmail.com

Diterima: 09-12-2025 | Disetujui: 19-12-2025 | Diterbitkan: 21-12-2025

ABSTRACT

The Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) is a strategic bilateral cooperation instrument that reflects the increasingly close economic relationship between Indonesia and South Korea in response to the growing complexity of global dynamics, particularly in the Asia–Pacific region. This study employs a descriptive qualitative approach, drawing on Robert Gilpin's International Political Economy theory and Hans J. Morgenthau's concept of national interest as its analytical framework. The data are derived from secondary sources, including official agreement documents, trade and investment statistical reports, and publications from government institutions and international organizations. The findings indicate that the implementation of IK-CEPA has contributed to improved market access for Indonesian products, stimulated foreign direct investment (FDI) inflows from South Korea, and strengthened Indonesia's position in global economic diplomacy. Nevertheless, this cooperation also presents significant challenges, such as potential imbalances in trade structures and a tendency toward dependency on a strategic partner. Therefore, the success of this agreement depends on Indonesia's ability to manage opportunities prudently and measurably, enhance domestic production capacity, and ensure that implemented policies are aligned with national interests. Within the context of free trade, the implementation of IK-CEPA should be directed toward fostering fair and sustainable economic relations that do not benefit only one party, but also enhance Indonesia's economic resilience amid global competition.

Keywords: *IK-CEPA; International Political Economy; National Interest; Indonesia; South Korea.*

ABSTRAK

IK-CEPA (Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) merupakan instrumen kerja sama bilateral strategis yang mencerminkan semakin eratnya hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini disusun dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan teori Ekonomi Politik Internasional dari Robert Gilpin dan konsep kepentingan nasional menurut Hans J. Morgenthau sebagai landasan analisis. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder seperti dokumen perjanjian resmi, laporan statistik perdagangan dan investasi, serta publikasi dari institusi pemerintah dan organisasi internasional. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi IK-CEPA berkontribusi pada peningkatan akses pasar bagi produk Indonesia, mendorong arus investasi asing langsung (FDI) dari Korea Selatan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ranah diplomasi ekonomi global. Meski demikian, kerja sama ini juga menghadirkan tantangan serius, seperti potensi ketimpangan

dalam struktur perdagangan dan kecenderungan ketergantungan terhadap mitra strategis. Oleh karena itu, keberhasilan perjanjian ini bergantung pada kemampuan Indonesia dalam mengelola peluang secara cermat dan terukur, memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan kepentingan nasional. Dalam konteks perdagangan bebas, pelaksanaan IK-CEPA harus diarahkan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.

Katakunci: IK-CEPA; Ekonomi Politik Internasional; Kepentingan Nasional; Indonesia; Korea Selatan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sitty Maisyaro Kalauw, Nurinaya, N., & Etik Siswatiningrum. (2025). Kerja Sama Indonesia–Korea melalui Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) terhadap Ekonomi Politik Internasional Indonesia Tahun 2020–2023. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 2046-2057. <https://doi.org/10.63822/pk7a4008>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan mendapat perhatian di dunia Internasional. Ekonomi Indonesia termasuk terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian (Ekbangsetda, 2019).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan yang begitu erat membuat kedua negara tersebut menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1973. Hubungan tersebut didasari pada strategi kemitraan yang mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi, budaya, teknologi, dan perlindungan. Sebagai dua negara yang memiliki kawasan asia dengan posisi strategi hubungan Korea selatan dan Indonesia mencerminkan semangat kerjasama untuk mencapai kepentingan bersama. Situasi internasional saat ini masih sangat dipengaruhi oleh Perang Dingin, mempengaruhi politik masing-masing negara. Hubungan antara Korea Selatan dan Indonesia menjadi tegang karena politik politik Korea Selatan cenderung pro-Barat sedangkan politik Indonesia cenderung anti-Barat.

Peningkatan komunikasi mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan kerjasama yang terjalin. Beralih dari fokus awal pada perdagangan dan kerjasama ekonomi menjadi kemitraan yang lebih komprehensif yang mencakup berbagai bidang. Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi terbuka telah berupaya memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai bentuk kerjasama internasional, termasuk perjanjian bilateral dengan negara-negara seperti Korea Selatan (Ragimun Abdullah, 2017)

Pemerintah Indonesia secara aktif membangun berbagai bentuk kerjasama strategis dengan negara mitra, salah satunya melalui perjanjian kemitraan ekonomi menyeluruh dengan Republik Korea Selatan yang di kenal dengan nama *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) (Yusri Nurhidayah, 2024) merupakan perjanjian bilateral dalam perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*) yang mencakup berbagai sektor perdagangan barang, jasa, investasi, kolaborasi ekonomi dan hukum antar kedua negara. Pemerintah Indonesia telah menyetujui perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 yang ditetapkan pada bulan September 2022 dan mulai diimplementasi secara resmi sejak 1 Januari 2023 (web Bea dan Cukai, 2023)

IK-CEPA adalah contoh utama dari Upaya strategi yang dilakukan oleh kedua negara untuk mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan, perjanjian ini memfasilitasi pemenuhan komoditas yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus akses kepada Korea Selatan ke yang lebih besar (Ragimun Abdullah, 2017). Sebelum secara resmi disahkan oleh Presiden dari kedua negara, proses perundingan Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) diawali dengan pembentukan *Joint Study Group* (JSG) sebagai tindak lanjut dari inisiatif kerja sama tersebut. Kelompok studi bersama ini mengadakan tiga kali pertemuan sepanjang tahun 2011, yang berlangsung di Jakarta dan Seoul, untuk membahas potensi serta manfaat kerja sama ekonomi kedua negara. Hasil dari rangkaian pertemuan tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen resmi berjudul *Report of the Joint Study Group*, yang menjadi dasar awal dimulainya proses negosiasi IK-CEPA secara formal (Nana Triharyanti dkk, 2023).

Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan menjadikan adanya kepentingan politik melalui perjanjian IK-CEPA memiliki peran strategis untuk memperkuat peluang kerjasama yang sebelumnya belum pernah terjadi antara Indonesia dan Korea Selatan. Seperti fasilitasi perdagangan, liberalisasi investasi dan harmonisasi aturan Kepabeanan. IK-CEPA juga meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan penanaman modal dengan melindungi investor dari kedua negara dan memberikan jaminan hukum bagi para investor. Dalam cakupan IK-CEPA membahas tarif, pengurangan hambatan nontarif, dan penyelesaian masalah teknis seperti, kepabeanan, *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan kesepakatan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS). sebaliknya, IK-CEPA mendorong kerjasama di bidang logistik, ketenagakerjaan, lingkungan, ekonomi kreatif, dan pembangunan kapasitas. Dari kerjasama tersebut dapat meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Oleh karena itu, IK-CEPA membantu Indonesia dan Korea Selatan meningkatkan hubungan diplomatik dan sinergi strategis di berbagai tingkatan, baik di tingkat regional maupun Internasional.

Dari analisis yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA) telah meningkatkan perekonomian Indonesia secara signifikan. Dengan adanya kerjasama ini sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik agar membantu kestabilan perdagangan ekonomi politik internasional bagi kedua negara yaitu Indonesia dan Korea Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif guna mengkaji secara mendalam dampak kerja sama Indonesia-Korea melalui *Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) terhadap peningkatan ekonomi politik internasional Indonesia pada periode 2020-2023. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti, serta membantu peneliti dalam mengenali kecenderungan, pola interaksi, dan dinamika yang terjadi dalam hubungan ekonomi-politik antara Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek-aspek utama seperti volume perdagangan, aliran investasi, serta intensitas kerja sama ekonomi dan politik kedua negara. Tujuannya adalah untuk menyajikan analisis yang menyeluruh mengenai peran strategis IK-CEPA dalam memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan ekonomi politik internasional. Analisis dilakukan dengan mengacu pada data aktual di lapangan, yang kemudian ditafsirkan secara kontekstual dalam lanskap hubungan internasional masa kini.

Pengumpulan Data dan Analisis Data

Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data melalui Studi Literatur, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan, Dokumen Resmi: dokumen perjanjian IK-CEPA dan Laporan dari Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik. Laporan Organisasi Internasional: Laporan dari WTO, UNCTAD, dan organisasi lain yang relevan. Literatur Akademi: Artikel jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya yang membahas IK-CEPA atau kerja sama ekonomi bilateral. Data Statistik: Data perdagangan dan investasi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan.

Data dianalisis melalui berbagai langkah. Dampak kerja sama terhadap perdagangan, investasi, dan penyerapan tenaga kerja disoroti melalui rangkum dan pemisahan informasi mentah pada tahap pertama.

Selanjutnya, untuk memudahkan interpretasi, data disajikan dalam tabel kualitatif. Misalnya, melakukan perbandingan antara data ekspor dan impor Indonesia ke Korea Selatan sebelum dan sesudah implementasi IK-CEPA. Pada langkah terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan melalui triangulasi untuk memastikan bahwa temuan itu valid.

Unit Analisa

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah peningkatan kinerja ekonomi Indonesia, yang diukur melalui sejumlah indikator seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan aktivitas ekspor-impor, serta masuknya investasi asing langsung (FDI) dari Korea Selatan. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah implementasi dari perjanjian IK-CEPA, yang meliputi aspek kebijakan perdagangan bebas, penghapusan hambatan tarif, dan perluasan akses pasar untuk produk dan jasa dari kedua negara. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah dokumen resmi, laporan dari instansi pemerintah, serta publikasi ilmiah yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada era globalisasi yang semakin mendalam, kerjasama ekonomi Internasional melalui skema perjanjian perdagangan bebas seperti Indonesia- Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) merupakan bagian dari diplomasi ekonomi bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Perjanjian tersebut juga merupakan kemitraan ekonomi yang mencakup perdagangan bebas global. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) pertama kali ditandatangani pada tahun 2012 dengan tujuan utama meningkatkan volume perdagangan antara Indonesia dan Korea. Dan pada tahun 2014, IK-CEPA terpaksa dibatalkan karena beberapa faktor yang tidak sesuai dengan kepentingan masing-masing negara.

Keberadaan IK-CEPA mencerminkan dorongan terhadap liberalisasi perdagangan dan keterbukaan pasar, yang secara normatif diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat konektivitas dan integrasi regional antara Indonesia dan Korea Selatan. Namun, dalam realitas implementasinya, perjanjian semacam ini tidak bisa dipandang semata sebagai instrumen teknokratis yang netral bagi pembangunan ekonomi maupun dinamika politik domestik. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik internasional menjadi alat analitis yang krusial untuk menelaah secara kritis bagaimana kepentingan nasional dibentuk, dinegosiasikan, dan dikompromikan dalam kerangka kerjasama seperti IK-CEPA.

Sebagai perwujudan nyata dari penguatan hubungan strategis dalam kerangka kerja sama perdagangan bebas, *Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) telah membawa dampak signifikan terhadap arah dan dinamika hubungan ekonomi-politik antara Indonesia dan Korea Selatan. Perjanjian ini tidak sekadar memfasilitasi arus perdagangan barang, jasa, dan investasi antar kedua negara, tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kapasitas kedua pihak dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Lebih dari itu, IK-CEPA menjadi instrumen vital dalam mendorong integrasi ekonomi regional dan memperluas jangkauan pengaruh strategis Indonesia serta Korea Selatan di tengah kompetisi global yang kian terhubung secara sistemik. Melalui optimalisasi

potensi kerja sama ini, kedua negara tidak hanya memperkuat struktur ekonominya masing-masing, tetapi juga menegaskan posisi mereka sebagai aktor penting dalam percaturan ekonomi internasional yang dinamis dan penuh persaingan.

1. Dampak Ekonomi

Tabel 1. Peningkatan Ekspor dan Impor Indonesia dan Korea Selatan Tahun 2020-2023

Tahun	Ekspor	Impor	Nilai perdagangan (Ekspor + Impor)	Neraca Perdagangan (Ekspor - Impor)
2020	6.507,60	6.849,40	13.357,00	-341,80
2021	8.980,50	9.427,20	18.407,70	-446,70
2022	12.808,70	11.717,90	24.526,60	+1.909,80
2023	10.301,80	10.525,80	20.827,60	-224,00
2024	10.755,04	9.339,11	20.094,15	+1.415,93

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) memberikan akses yang lebih luas untuk ekspor Indonesia, khususnya dari sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. Korea Selatan telah menghapus tarif impor hingga 95,5% dari pos tarif untuk produk Indonesia membuka peluang besar bagi eksportir dalam negeri besaran penghapusan pos tarif Korea Selatan sekitar 5,5% lebih tinggi dari komitmen di ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) yang mencapai 90% pos tarif (Puteri Abdi Rabbi, 2021).

Pada tahun 2020-2023 peningkatan yang cukup signifikan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk kondisi ekspor dan impor yang dialami oleh kedua negara. Namun pada tahun 2020 mengalami tekanan dinamika perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan diakibatkan oleh COVID-19 yang melanda kedua negara tetap menunjukkan ketahanan yang kuat, tercemin dari stabilitas volume perdagangan dan kesinambungan arus ekspor-impor ditandai dengan berbagai komoditas pada ekspor Indonesia ke Korea Selatan yaitu, Batu bara menjadi komoditas ekspor utama, seiring dengan meningkatnya harga energi global serta kebutuhan industri energi Korea Selatan, Bijih Nikel dan Feronikel strategi dalam mendukung sektor baterai kendaraan Listrik terutama terkait investasi LG dan Hyundai di Indonesia, Minyak Kelapa Sawit digunakan di sektor pangan dan Industri olahan, Karet Alam dimanfaatkan dalam sektor konstruksi dan otomotif, Baja Tahan Karar, serta Produk Kayu Olahan dan Furnitur mencerminkan kontribusi sektor kehutanan dan industri kreatif nasional. Sedangkan, pada komodita utama Impor Indonesia dari Korea Selatan yaitu, Mesin dan Peralatan Mekanik untuk menunjang industrialisasi nasional, Komponen Elektronik dan Semikonduktor untuk sektor otomotif, digital, dan manufaktur, Produk Kimia dan Petrokimia bahan tersebut dibutuhkan untuk industri kosmetik, tekstil, dan pangan, Plastik dsigunakan untuk bahan baku industri, serta Kendaraan Bermotor dan Suku Cadang mengalami peningkatan seiring dengan ekspansi merek Korea dan pertumbuhan konsumsi domestik (Badan Pusat Statistik, 2025).

pada tahun 2024 memperlihatkan dampak positif dari kebijakan perdagangan luar negeri, termasuk pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) yang membuka akses pasar ekspor lebih luas. Secara keseluruhan, dalam rentang waktu lima tahun, ekspor Indonesia meningkat sekitar **65,21%**, sedangkan impor hanya naik sekitar **36,29%**. Capaian ini menunjukkan penguatan daya saing produk domestik di pasar internasional serta peran penting sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi perjanjian kerja sama ekonomi ini dirancang untuk mempererat hubungan ekonomi bilateral, mendorong peningkatan volume perdagangan dan arus investasi, serta memperluas cakupan kolaborasi strategis antara kedua negara dalam berbagai sektor pembangunan (Vanda Kartasasmita, 2023).

a. Investasi

Pada tahun 2020, nilai investasi Korea Selatan yang masuk ke Indonesia berada pada kisaran 1.841 juta USD. Namun demikian, pada tahun 2021, terjadi penurunan investasi menjadi sekitar 1.640 juta USD, atau mengalami kontraksi kurang lebih 10,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19 yang menghambat mobilitas investasi lintas negara. Tahun 2022, arus investasi mulai menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan. Nilai investasi meningkat menjadi sekitar 2.297 juta USD, mencerminkan adanya peningkatan sekitar 35% dibandingkan tahun 2021. Tren pertumbuhan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai investasi mencapai 2.543 juta USD, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2024 dengan nilai investasi sebesar 2.987 juta USD. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang stabil dalam minat investor Korea Selatan terhadap Indonesia selama periode tersebut.

Salah satu pendorong utama meningkatnya investasi Korea Selatan ke Indonesia selama periode 2020-2024 adalah sektor industri dan manufaktur. Dalam sektor ini perusahaan baja asal Korea Selatan, POSCO menjalin kemitraan strategis dengan PT Krakatau Steel dalam pengembangan dan ekspansi industri baja nasional yang berlokasi di Cilegon. Kerjasama tersebut berkontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur serta mendukung agenda hilirisasi industri logam di Indonesia. Selanjutnya, sektor kendaraan listrik menjadi fokus kerjasama bilateral yang semakin menonjol. *Hyundai Motor Group* dan *LG Energy Solution* menggerakkan investasi berskala besar melalui kolaborasi dengan PT Aneka Tambang (Antam) dan *Indonesia Battery Corporation* (IBC) guna membangun industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di kawasan industri Batang, Jawa Tengah (redaksi, 2022).

Secara keseluruhan, arus investasi Korea Selatan ke Indonesia selama periode 2020–2023 menunjukkan peningkatan intensitas hubungan ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Investasi yang masuk tidak bersifat sementara, melainkan dirancang untuk jangka panjang dan bersifat strategis. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam memperkuat fondasi ketahanan ekonomi, membuka lebih banyak peluang kerja, serta mendorong inovasi dan transformasi di sektor industri dalam negeri.

b. Akses Pasar Barang dan Jasa

Perjanjian IK-CEPA menghadirkan kerangka liberalisasi perdagangan yang diformulasikan untuk mereduksi berbagai hambatan tarif maupun non-tarif, dengan tujuan memperlancar mobilitas barang dan jasa di antara Indonesia dan Korea Selatan. Dari sisi kuantitatif, implementasi kebijakan ini berdampak positif terhadap peningkatan nilai ekspor Indonesia, khususnya dalam sektor-sektor unggulan seperti

pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri manufaktur bernilai tambah rendah hingga menengah. Akses pasar yang diberikan Indonesia lebih besar produk (Komoditas Pertanian, dan Komponen Manufaktur Ringan). Sedangkan dari Korea memberikan kesempatan ekspor mesin, kendaraan, dan komponen elektronik.

c. Kerjasama Ekonomi

Untuk memperluas cakupan kerja sama ekonomi bilateral dengan memasukkan sektor-sektor penting seperti transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, energi terbarukan, serta penelitian dan inovasi teknologi. Kerja sama ini disusun dalam kerangka kerja normatif yang bertujuan untuk mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi kedua negara, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi yang modern dan berwawasan lingkungan.

Setelah diimplementasikan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Korea selatan melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) terdapat beberapa kesepakatan kerja sama yang sudah terjalin di bidang Ekonomi dan perdagangan, MoU Ekosistem Kendaraan Listrik, Dukungan Investasi Korporasi, Promosi UMKM dan Energi Hijau, Politik dan Keamanan, dan Diplomasi Tingkat Tinggi dan Strategi Indo-Pasifik.

2. Dampak Politik

Secara politik, perjanjian ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Marxisme menilai bahwa kerja sama antarnegara bukanlah hubungan yang setara, melainkan cermin dari distribusi kekuatan ekonomi global. IK-CEPA tidak hanya menjadi alat ekspansi pasar Korea Selatan di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara-negara maju dapat mendikte arah kebijakan ekonomi negara berkembang melalui instrumen perdagangan.

a. Peningkatan Hubungan Diplomatik

Implementasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (IK-CEPA) memengaruhi banyak hal, bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik kedua negara. Perjanjian ini meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Korea Selatan. Kedua negara tidak hanya meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga mendorong kerja sama politik di luar negeri. Secara signifikansi IK-CEPA dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan terletak pada tujuan utamanya, yaitu untuk meningkatkan dan menstabilkan volume perdagangan antara kedua negara. Sebelum adanya kesepakatan yang terjalin antara kedua yaitu Indonesia dan Korea Selatan terjadi proses yang sangat panjang dalam perundingan IK-CEPA untuk kedua negara.

Indonesia dan Korea Selatan merupakan dua negara yang memiliki posisi geopolitik strategis di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, yang secara konsisten membangun serta memperluas jalinan kerja sama politik internasional. Kolaborasi antara kedua negara tidak hanya terbatas pada hubungan diplomatik formal, melainkan juga mencakup sektor-sektor strategis seperti pertahanan dan keamanan, penguatan sistem hukum, transformasi pemerintahan digital, serta keterlibatan aktif dalam forum multilateral regional dan global. Dalam konteks dimensi politik dari hubungan bilateral ini mengalami penguatan signifikan, mencerminkan arah kebijakan luar negeri yang bersifat holistik, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Fenomena ini sekaligus mengindikasikan komitmen kedua negara dalam membangun kemitraan yang tidak

hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga bersifat strategis dalam memperkuat stabilitas dan tatanan politik kawasan.

Pada 21 Februari 2020 Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi menerima kunjungan resmi Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MoTIE) Korea Selatan Moon Sung Wiik di kantor Kementerian Perdagangan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan kerja Menter Moon ke Indonesia dengan fokus pembahasan pada sejumlah isu, antara lain kerja sama perdagangan, investasi, serta peran Indonesia dalam Presiden G20 2020. Masing masing agenda tersebut memiliki fokus utama salah satunya pada pembahasan isu terkait kerja sama perdagangan, baik dalam konteks bilateral maupun regional, khususnya mengenai penyelesaian proses ratifikasi IK-CEPA dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang ditargetkan rampung pada Maret 2022. Pemerintah Korea Selatan secara khusus menyampaikan permohonan dukungan dari Indonesia terkait pencalonan Kota Busan sebagai tuan rumah World expo 2030 (Tim Redaksi, 2022)

pada tahun 2024 Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia telah menerima sumbangan Kapal Selam dari Korea Selatan berupa kapal Korvet Bucheon 773 berusia 36 tahun dengan memiliki Panjang 88,3 meter yang dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan militer Indonesia, walaupun di saat itu ada timbul kekhawatiran yang dialami oleh Komite Pertahanan dikarenakan biaya yang akan dikeluarkan untuk perawatan kapal tua tersebut yang mencapai 85 juta dolar AS. Tetapi pemerintah tetap melanjutkan kebijakan tersebut sebagai modernisasi militer.

Rendahnya belanja pertahanan Indonesia dibandingkan PDB menjadikannya tertinggal dari negara-negara tetangga di kawasan. Mayoritas anggota komisi parlemen yang membidangi urusan pertahanan menyatakan keraguan terhadap efektivitas hibah tersebut bagi kepentingan nasional. Hibah ini diberikan setelah tercapainya kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan terkait penyelesaian sengketa pendanaan proyek jet tempur bersama KF-21, yang memiliki nilai investasi sedikitnya 6 miliar dolar AS (Ananda Teresia, 2024).

Beberapa Kerjasama politik internasional yang telah terjalin anatar kedu anegara yaitu Indonesia dan Korea Selatan menandatangani perjanjian Kerjasama hukum pada tanggal 26 februari 2025, Sejeong, Korea Selatan dengan agenda *Indonesia and South Korea have signed a Memorandum of Understanding (MoU) to enhance collaboration in legal information systems and legislative exchange*. Agenda ini berfokus pada pertukaran hukum langsung, pengembangan sistem informasi hukum yang lebih canggih, inisiatif pengembangan kapasitas, dan konferensi internasional. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun kedepan ini merupakan kelanjutan dari kemitraan bilateral yang telah terjalin sebelumnya, yang mencakup inisiatif penelitian bersama serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Melalui kerja sama ini, kedua negara berkomitmen untuk membangun sistem hukum yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap dinamika global, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan (Redaksi, 2025)

3. Tantangan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan dalam proses internasionalisasi adalah minimnya informasi mengenai pasar global. Banyak perusahaan, khususnya yang baru memulai ekspansi ke luar negeri, kesulitan dalam memahami cara yang tepat untuk mengenalkan produk mereka di pasar internasional. Kurangnya wawasan tentang karakteristik dan dinamika pasar luar negeri serta keterbatasan

akses ke pasar tersebut sering kali menjadi faktor penghambat ekspansi dan meningkatkan potensi risiko bisnis. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap pasar sasaran agar dapat mengenali peluang dan tantangan yang ada, serta menyesuaikan produk dan strategi pemasaran secara tepat. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan asosiasi perdagangan menjadi sangat penting sebagai penyedia informasi dan pendamping bagi perusahaan dalam menjelajahi pasar global secara lebih terarah dan efektif.

Selain itu, kendala keuangan merupakan masalah yang signifikan, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses modal atau lembaga keuangan yang dapat mendukung ekspansi internasional mereka. Oleh sebab itu, peran pemerintah dan lembaga keuangan menjadi krusial dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM. Dukungan berupa program seperti subsidi, insentif pajak, hingga skema pembiayaan khusus dapat membantu mengurangi beban risiko sekaligus memperlancar proses perencanaan dan pelaksanaan ekspansi ke pasar internasional. Dengan adanya dukungan finansial yang tepat sasaran, UMKM akan lebih mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperkuat strategi pemasarannya, sehingga dapat memperluas jangkauan pasar mereka di tingkat global (Syuryansyah & Bagaskara Wijaya, 2024).

KESIMPULAN

Dari aspek ekonomi, IK-CEPA telah memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan volume perdagangan bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Dengan dihapuskannya lebih dari 95% tarif bea masuk, produk-produk unggulan Indonesia seperti perikanan, tekstil, pertanian, dan otomotif memperoleh akses pasar yang lebih luas ke Korea Selatan. Selain itu, masuknya investasi asing langsung dari Korea Selatan, khususnya di sektor baja, petrokimia, kendaraan listrik, dan energi terbarukan, membuktikan bahwa IK-CEPA berhasil menarik minat investor sekaligus mendukung program hilirisasi industri nasional. Sisi politik internasional, IK-CEPA memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Indonesia tidak hanya dipandang sebagai mitra ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memperkuat stabilitas kawasan, memperluas kerjasama teknologi, serta memajukan agenda pembangunan berkelanjutan. Keempat, secara akademik, temuan dalam skripsi ini menegaskan relevansi pendekatan Ekonomi Politik Internasional yang dikemukakan oleh Robert Gilpin serta teori Kepentingan Nasional Hans Morgenthau. Hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan dalam kerangka IK-CEPA menunjukkan bagaimana dinamika kekuatan ekonomi dan politik antarnegara dapat digunakan sebagai sarana mencapai kepentingan nasional masing-masing pihak secara resiprokal.

Pemerintah Indonesia perlu meninjau ulang serta memperkuat diplomasi ekonomi yang bersifat ofensif dan proaktif, bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi perancang arah kerja sama bilateral. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Investasi/BKPM harus berperan sebagai simpul utama yang mengintegrasikan kebijakan perdagangan luar negeri dengan agenda pembangunan nasional. IK-CEPA harus diposisikan bukan sekadar sebagai perjanjian perdagangan, tetapi juga sebagai pendorong transformasi ekonomi nasional menuju struktur industri bernilai tambah tinggi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama internasional seperti IK-CEPA tetap berada dalam kerangka perlindungan terhadap kepentingan nasional. Liberalisasi perdagangan dan investasi harus tetap dikendalikan dalam koridor kebijakan industri domestik dan keberlanjutan sosial.

Indonesia membutuhkan sistem pemantauan dan evaluasi kerja sama internasional yang berbasis data, obyektif, dan transparan. Hal ini penting untuk mengetahui secara nyata apakah perjanjian seperti IK-CEPA benar-benar membawa keuntungan, atau justru menimbulkan ketimpangan baru. Evaluasi tersebut harus melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha sebagai pihak independen yang memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin berterima kasih kepada Ibu Etik Siswatiningrum, M.H.I dan Ibu Nurinaya, M.H.I yang telah membimbing dalam penulisan jurnal ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Teresia. (2024). *Indoensia accepts South Korea warship donation, despite cost concerns*. Jakarta: Reuters.com. Retrieved from <https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/indonesia-accepts-south-korea-warship-donation-despite-cost-concerns-2024-06-06/>
- Badan Pusat Statistik. (2025, Juli 8). *Nilai Neraca perdagangan (Juta US\$)*. Retrieved from BPS.go.id: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk4IzI=/nilai-neraca-perdagangan--april-2025.html>
- Ekbangsetda. (2019). *Ekonomi Indonesia* . Kabupaten Buleleng: <https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/ekonomi-indonesia-29>.
- Nana Triharyanti dkk. (2023). Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA tahun 2019-2022. *ADMINISTRAUS - JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN*, 7, 8-9. doi:10.56662/administraus.v7i3.196
- Puteri Abdi Rabbi. (2021). *Implementasi IK-CEPA, 11.687 Produk Ekspor RI Bebas Bea Masuk Korsel*. Indonesia: katadata.co.id. Retrieved from <https://katadata.co.id/berita/industri/61b012e024f3c/implementasi-ik-cepa-11687-produk-ekspor-ri-bebas-bea-masuk-korsel>
- Ragimun Abdullah. (2017). Analysis of Trade in Goods between Indonesia and South Korea on Cooperation Forum IK-CEPA. *Journal of Economic and Behavioral Studies*, 8, 171-182. doi:[https://doi.org/10.22610/jebis.v8i6\(J\).1491](https://doi.org/10.22610/jebis.v8i6(J).1491)
- redaksi. (2022). *Ini Strategi Pemerintah Muluskan Peta Jalan Transisi Energi Menuju Karbon Netral*. Jakarta Pusat: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-kenagalistrikan/ini-strategi-pemerintah-muluskan-peta-jalan-transisi-energi-menuju-karbon-netral>
- Redaksi. (2025). *Indonesia dan Korea Selatan Tandatangi Pakta untuk Meningkatkan Kerja Sama Hukum*. Batam: BidTIKKepriNews. Retrieved from <https://bidtik.kepri.polri.go.id/indonesia-south-korea-sign-pact-to-boost-legal-cooperation>
- Syuryansyah & Bagaskara Wijaya. (2024). IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA-KOREA (IK-CEPA) ANALISIS DAMPAK STRATEGIS DAN EKONOMI TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL DAN REGIONAL. *Jurnal Sosio Dialektika*, 9, 15-17. doi:<https://dx.doi.org/10.31942/sd.v9i.11981>

- Tim Redaksi. (2022). *Mendag RI terima Kunjungan MoTIE Korea Selatan Bahas Isu Perdagangan Bilateral dan Regional*. Jakarta Pusat: KEMENTERIAN PERDAGNGAN RI. Retrieved from <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/mendag-ri-terima-kunjungan-motie-korea-selatan-bahas-isu-perdagangan-bilateral-dan-regional>
- Vanda Kartasasmita. (2023). *Indonesia-Korea Comprehensive Economi Partnership Agreement*. Jakarta Selatan: UMKMINDONESIA.ID. Retrieved from <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/indonesia-korea-comprehensive-economic-partnership-agreement-ik-cepa>
- web Bea dan Cukai. (2023). *IK-CEPA resmi di implementasikan, pahami ketentuan bea masuk barang dari korea*. Jakarta Timur: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Retrieved from <https://www.beacukai.go.id/berita/ik-cepa-resmi-diimplementasikan-pahami-ketentuan-bea-masuk-barang-dari-korea.html>
- Yusri Nurhidayah. (2024). Trade Potential in the Bilateral Relationship Between Indonesia-South Korea 2013-2022. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9, 262. doi:<https://doi.org/10.70836/jh.v9i2.53>